



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

NOTULENSI RAPAT TIM PELAKSANA EITI INDONESIA

- Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2017
- Waktu : 13.30 WIB – Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Serayu Lantai 3, Gedung Ali Wardhana
Kemenko Bidang Perekonomian
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
- Agenda : 1. Pembukaan;
2. Pemaparan Independent Administrator (IA), KAP Heliantono & Rekan;
3. Diskusi dan tanya jawab;
4. Pemaparan draft Laporan *Commodity Trading*.
- Peserta Rapat : 1. Perwakilan Kementerian/Lembaga (Kemenko Bidang Perekonomian, Ditjen Minerba dan Setjen Kementerian ESDM, Ditjen Pajak, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Anggaran, dan Ditjen Perbendaharaan - Kementerian Keuangan, Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, SKK Migas, dan Kemenko Bidang Perekonomian);
2. Perwakilan dari Asosiasi Industri Ekstraktif (IMA dan APBI);
3. Pertamina
4. Perwakilan dari CSO (Article 33 Indonesia dan PWYP Indonesia);
5. Perwakilan Bank Dunia;
6. Team Independent Administrator (IA), KAP Heliantono & Rekan;
7. Sekretariat EITI Indonesia.
(Daftar Hadir Terlampir)

A. PEMBUKAAN

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Asdep Industri Ekstraktif, selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif mewakili Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif. Beberapa hal yang disampaikan antar lain kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh EITI Indonesia dalam waktu dekat ini antara lain *Global Conference* mengenai Beneficial Ownership (BO) di Jakarta, Rencana pembentukan EITI di Daerah, kegiatan *“The South-East and the Pacific EITI*

Regional Workshop" pada tanggal 25-27 Oktober 2017 di Kota Manila, Filipina. Terakhir pimpinan rapat meminta agar *Independent Administrator* (IA), KAP Heliantono & Rekan dapat memaparkan Rencana Kerja penyusunan Laporan EITI Indonesia 2015.

Selanjutnya, *Team Leader* Sekretariat EITI Indonesia secara ringkas menjelaskan 4 Laporan EITI Indonesia yang telah dihasilkan sejak Indonesia menjadi negara pelaksana EITI yaitu Laporan EITI Indonesia Tahun Kalender 2009, 2010-2011, 2012-2013 dan terakhir Tahun Kalender 2014. Hasilnya, tidak terdapat *discrepancy* (perbedaan) yang signifikan penerimaan negara oleh K/L terkait dengan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan industri ekstraktif. Isi laporan juga umumnya sudah memenuhi *requirements standard* EITI dan TOR *Independent Administrator*. Namun demikian, untuk Laporan EITI Tahun Kalender 2015, IA diharapkan dapat menyusun laporan dengan analisis yang lebih komprehensif, tidak hanya sekedar *requirements standard* EITI dan TOR.

B. PEMAPARAN INDEPENDENT ADMINISTRATOR (IA)

Materi paparan dari Independent Administrator (IA), KAP Heliantono & Rekan adalah:

1. Pengenalan personalia Team;
2. Time schedule Laporan Kontekstual dan Rekonsiliasi Penerimaan Negara;
3. Tanggapan atas TOR IA; dan
4. Tanggapan atas formulir pelaporan Rekonsiliasi Penerimaan Negara.

Penyusunan Laporan EITI Tahun Kalender 2015 direncanakan selama 16 minggu. Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) direncanakan dapat diselesaikan pada minggu ke-4 (minggu ke-1 bulan September), *draft* pertama selesai pada minggu ke-10 (minggu ke-2 bulan Oktober), penyerahan *draft* final pada minggu ke-13 (setelah review dari Tim Pelaksana atas *draft* pertama), terakhir Laporan final pada minggu ke-16 (akhir bulan November 2017) setelah review dari Tim Pelaksana.

Ada 5 butir tanggapan IA atas TOR Laporan EITI Tahun 2015 yaitu mengenai:

1. Keterbukaan Kontrak;
2. *Beneficial Ownership* EITI Indonesia;
3. Dampak Industri Ekstraktif di daerah;
4. Jaminan reklamasi dan pasca tambang; dan
5. Informasi Kadasteral.

C. PEMBAHASAN, TANGGAPAN DAN MASUKAN

Pembahasan, tanggapan dan tanya jawab diawali dengan penyamaan persepsi dan klarifikasi atas tanggapan (pemahaman) IA atas 5 butir TOR yang telah dipaparkan oleh IA tersebut di atas. Beberapa hal yang muncul dalam diskusi dan tanya jawab antara lain :

- Mengenai perlu adanya peraturan pelaksana (PP) dari Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas (PT) mengenai CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- Perlu ada penyamaan persepsi mengenai AMDAL dan Jaminan reklamasi dan pasca tambang khususnya dalam hal ini antara Kementerian ESDM dan Kementerian LHK.

Hal lain yang disampaikan oleh peserta rapat dari CSO adalah perlunya memasukkan peraturan-peraturan/isu-isu hilir migas dalam Laporan EITI 2015. Wakil dari Kementerian Keuangan menyampaikan perlu kehati-hatian mengenai defenisi BO karena sampai saat ini masih belum ada defenisi final BO Nasional (Indonesia). Isu lain yang juga banyak didiskusikan dan menarik perhatian para peserta rapat adalah mengenai dampak (kontribusi) Industri Ekstraktif bagi daerah khususnya bagi daerah penghasil. Diharapkan Laporan Kontekstual EITI Indonesia dapat membantu Pemda untuk dapat melihat potensi-potensi yang dapat digali untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil dari IMA menyampaikan bahwa untuk peningkatan PAD, Pemda tidak dapat

mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor kepada alat-alat berat tambang karena telah ada Keputusan MK bahwa alat berat tambang tidak beroperasi di jalan raya/umum, hanya terbatas di jalan areal tambang yang dibangun oleh perusahaan pemilik tambang tersebut.

Terkait dengan Keterbukaan Kontrak, wakil dari Ditjen Minerba, Kementerian ESDM menyampaikan beberapa hal yaitu:

- Informasi terkait data Kontrak Pertambangan yang bisa dibuka untuk publik yang tidak berbayar perlu dilakukan diskusi;
- Data jaminan reklamasi tambang ada yang sudah dipublikasikan;
- One map minerba masih berbayar; sesuai dengan PP PPNBP
- Luas wilayah dan koordinat wilayah pertambangan ada yang tidak boleh untuk dipublikasi;
- Ketentuan mengenai CSR minerba sudah diatur di dalam Permen No.41/2016

Hal-hal lain yang dibahas antara lain adalah dari :

Independent Administrator: yang mengusulkan :

- CSR tidak dilakukan rekonsiliasi tetapi cukup *disclose*.
- Berdasarkan pengalaman tahun lalu, IA mengusulkan agar *reporting template data CSR* yang diklasifikasi sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh ESDM agar lebih mudah dalam konsolidasi. Pembayaran fee transportasi untuk perusahaan Batubara (PT Bukit Asam dan PT KAI). Namun pada *reporting template* belum memuat PT KAI sebagai lawan transaksi. IA mengusulkan agar PT KAI diberikan *reporting template* dari awal.

PWYP/CSO Indonesia :

- Memberi masukan agar isu hilir dapat dibahas dalam kerangka regulasi untuk sektor Migas sehingga EITI tidak hanya memuat isu-isu di bagian hulu saja.
- Rekomendasi laporan EITI Tahun 2014, Kementerian ESDM harus membuat uji konsekuensi ketika menyatakan informasi/data Kontrak Pertambangan yang tertutup.
- Perusahaan yang tidak punya NPWP, yang menunggak *royalty* dan *deadrent*, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya seharusnya dapat dibuka ke publik.

Ditjen Perbendaharaan Negara :

- Terkait mengenai definisi BO sebaiknya perlu hati-hati sebelum ada definisi BO Nasional yang definitif.
- Setuju agar perusahaan yang tidak memiliki NPWP dibuka kepada publik khususnya kalau ada perusahaan PKP2B dan KK sektor minerba.

APBI :

- terkait isu dampak lingkungan dalam penyusunannya harus ada kriteria data-data yang diambil, dan akan didiskusikan bersama di dalam MSG.
- Referensi data dari bank Indonesia, yang merilis data mengenai pertumbuhan di beberapa sentra-sentra pertambangan terutama di Kalimantan bisa dijadikan referensi.
- Mengenai Jaminan Reklamasi tambang, karena rekeningnya qq dengan Pemda (?), akan lebih efektif jika diupayakan permintaan data ke Pemerintah Daerah/Bupati atau Provinsi, karena jika ke perusahaan mungkin agak sulit, dan jika ke asosiasi jumlah anggotanya sangat terbatas.

Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri :

- Berharap industri ekstraktif bisa memberikan *multiplier* efek terhadap pendapatan asli daerah (PAD), hal tersebut yang perlu diuraikan.

- Mengenai dampak sosial, sebenarnya banyak hasil-hasil yang tidak masuk pada pendapatan daerah, walaupun terdapat lain-lain pendapatan daerah yang sama, hal tersebut bisa dilihat dalam struktur APBD, apa saja yang bisa masuk dalam komponen industri ekstraktif yang bisa menambah pendapatan daerah.
- Jika hanya mengambil data-data di daerah, berupa data-data sekunder, supaya dijelaskan metodologi yang digunakan. Diusulkan sebaiknya mendapatkan data-data yang lengkap tidak hanya data-data sekunder saja, karena tidak banyak memberikan pengaruh terhadap kebijakan di daerah. Semua data bisa diambil dari daerah, tapi data tersebut masih perlu dieksplor lebih lanjut.

D. PEMAPARAN DRAFT LAPORAN COMMODITY TRADING.

Draft Laporan *Commodity Trading* dilakukan oleh Team Leader Sekretariat EITI Indonesia berhubung Konsultan yang menyusun draft laporan tersebut berhalangan untuk hadir memaparkannya. Secara ringkas dipaparkan isi dari draft laporan diawali dengan Summary, kemudian Konteks Rekomendasi dari Lingkup Laporan serta Pengarusutamaan (*mainstreaming*) Pelaporan Perdagangan Komoditi yang ada sekarang ini.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Team dari *Independent Administrator* (IA), KAP Heliantono & Rekan akan melakukan koordinasi dan diskusi lebih lanjut dengan masing-masing *stakeholders* secara bilateral untuk menindaklanjuti masukan-masukan hasil diskusi Rapat Tim Pelaksana hari ini sebagai pegangan untuk menyusun draft awal (*Inception Report*) Laporan EITI Tahun 2015.
2. Formulir Laporan EITI Indonesia Tahun Kalender 2015 sub-sektor migas agar disesuaikan sesuai dengan masukan dari SKK Migas yang telah disampaikan melalui Sekretariat EITI Indonesia.
3. Untuk rapat-rapat Tim Pelaksana mendatang, diminta agar seluruh anggota Tim Pelaksana yang diundang telah mendapatkan bahan-bahan rapat beberapa hari sebelumnya.

Jakarta, Agustus 2017

Mengetahui,

An. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif

Ahmad Bastian Halim
Asisten Deputi Industri Ekstraktif
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif